

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDY KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH)

Siti Haniatun Maslikah

Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro Semarang

(hanimaslikah@gmail.com)

ABSTRAK

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah dituntut untuk lebih mandiri, tidak terkecuali masalah keuangan. Pelaksanaan desentralisasi fiskal selain memberikan kewenangan juga mempengaruhi kemampuan daerah untuk memenuhi kepentingan publik sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2009-2011 yang diperoleh melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan alat analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

Kata Kunci : Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum

PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan (pemerintahan) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang di akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi ditahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-Undang No 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dengan Undang-Undang No 22/1999 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang No 25/1999 yang menggantikan Undang-Undang No 32/1956 yang berkaitan dengan keuangan Negara dan daerah.

Undang-Undang No 22/1999 tersebut berisi tentang perlunya dilaksanakan otonomi daerah sehingga Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi didalam dan luar negeri. Kondisi didalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan

kemandirian (desentralisasi). Di lain pihak, keadaan diluar negeri menunjukkan semakin maraknya daya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah.

Dengan adanya Undang-Undang No 22/1999 tentang pemerintahan daerah tersebut, maka dapat diduga bahwa terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah, termasuk dalam manajemen atau pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah.

Perkembangan reformasi terus berlanjut dengan diterbitkannya Undang-Undang No 32/2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang No 22/1999 dan Undang-Undang No 33/2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang No 25/1999. Akibatnya, sebagai konsekuensi peraturan perundang-undangan dibawahnya (Halim, 2002)

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa dana alokasi umum (DAU) yang di transfer ke pemerintah daerah. Dalam praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri (Maimunah, 2006).

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah dana alokasi umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (UU No 32/2004). Dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya (Putro, 2010).

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah

3. Perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.

Teori Agensi

Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik dan manajemen atau manajer. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*).

Pertentangan dan tarik menarik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dalam teori agensi disebut dengan *asymmetric information* (AI) yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Ketergantungan pada pihak eksternal pada tingkat akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat AI yang lebih tinggi, menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan diri sendiri.

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau yang sering disebut dengan pertumbuhan ekonomi adalah jumlah nilai tambah dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000 (BPS, 2013)

Pengertian yang lain, pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan (Sadono Sukirno, 2007).

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua metode pendekatan yakni :

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini disebut juga pendekatan Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dari cara menggunakan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah, dan keuntungan) tidak diperhitungkan berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan

untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi (BPS, 2013).

Pendapatan Asli Daerah

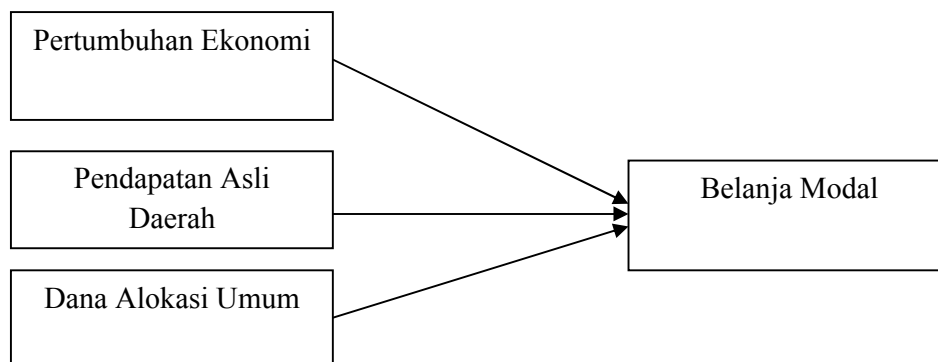
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Daerah yang mempunyai sarana dan prasana yang memadai dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut, sehingga akan menambah PAD.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan diberlakukannya Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001, maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa hasil pajak, bagi hasil SDA, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagai bagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang.

Dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh Negeri.

Kerangka Penelitian



Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Anggaran Belanja Modal

Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang berupa pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Pertumbuhan ekonomi ialah proses output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiwiyana (2011) terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Dari landasan teori dan temuan-temuan empiris diatas menghasilkan hipotesis berikut:

H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

Permana (2013) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan temuan empiris diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal

Pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan satbilas dan kesemimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah

pusat dan pemerintah daerah antar pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No. 33/2004).

Salah satu dan perimbangan adalah dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Putro (2010) menyatakan terdapat ketertarikan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Metode Penelitian

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi adanya variabel independen atau bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah belanja modal. Menurut PP No 71 tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, peralatan dan aset tak berwujud

Variabel Independen (X)

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi (G)} = \frac{\text{PDRB}_1 - \text{PDRB}_0}{\text{PDRB}_0} \times 100 \%$$

Dinamakan:

G = pertumbuhan ekonomi
PDRB = produk domestik regional bruto
PDRB₁ = PDRB riil tahun sekarang
PDRB₀ = PDRB riil tahun sebelumnya

2. Variabel Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU no 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, asil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sehingga variabel pendapatan asli daerah dapat diukur dengan rumus :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

3. Variabel Dana Alokasi Umum

Dana Lokasi umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian peneliti atau sebagai sebuah semesta penelitian (Ghozali, 2011). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota se-Jawa Tengah dari tahun 2009-2011.

Sampel

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi yang dianggap telah mewakili keadaan populasi. Dengan demikian maka pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah sejumlah 35 kabupaten atau kota. Dengan ketentuan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki daerah aktif, dapat membiayai daerahnya sendiri dimana Kabupaten/Kota tersebut menerbitkan laporan Realisasi APBD tahun 2009-2011.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD tahun 2009-2011 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran belanja modal,

pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum. Data produk domestik regional bruto per kapita diperoleh dari badan pusat statistik (BPS).

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi dimana data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan. Sumber dan penggunaannya dengan data statistik yang didapat dari data eksternal yaitu data yang diperoleh dari BPS. Sifat datanya adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka, dan bersifat obyektif.

Metode Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam melakukan pengujian terhadap multikolinearitas, dapat menggunakan nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* diatas 0,1 dan VIF dibawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas multikolinearitas.

2. Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Singgih santosa, 2011). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara untuk mendeteksi dapat menggunakan uji durbin watson. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen.

Menurut Singgih Santoso, terdapat tiga patokan:

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif

3. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam pengujian uji heteroskedastisitas, digunakan uji gletser. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

4. Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas atau variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Pengambilan keputusan didasarkan dengan melihat nilai signifikan. Apabila nilai signifikan $>0,05$

maka distribusi data normal, sebaliknya apabila nilai signifikansi $<0,05$ maka distribusi data tidak normal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PRDB} + \beta_2 \text{PAD} + \beta_3 \text{DAU} + e$$

Dimana:

Y	=	Belanja modal
α	=	Konstanta
β	=	Slope atau koefisien regresi atau Intersept
PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto
PAD	=	Pendapata Asli Daerah
DAU	=	Dana Lokasi Umum
e	=	error

Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik f menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikan F dari hasil pengujian lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Jika $\text{sig } t < 0,05$ maka suatu variabel independen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali,2011) . Sebaliknya, jika $\text{sig } t > 0,05$ maka suatu variabel independen secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah dari nol sampai satu.

Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam melakukan pengujian terhadap multikolinearitas, dapat menggunakan nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* diatas 0,1 dan VIF dibawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas multikolinearitas.

Tabel 4.2**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	61375.617	32608.574		1.882	.063			
PE	681675.019	542913.498	-.102	-1.256	.212	.897	1.114	
PAD	.666	.103	.563	6.448	.000	.779	1.283	
DAU	.069	.034	.171	2.034	.045	.837	1.195	

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari hasil uji multikolinearitas pada output SPSS diatas menunjukkan bahwa untuk ketiga variabel independen, angka *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Untuk PE bernilai 1,114, PAD bernilai 1,283, DAU bernilai 1,195. Demikian juga untuk nilai *Tolerance* > 0,1. Dimana PE bernilai 0,987, PAD bernilai 0,779, dan DAU bernilai 0.837. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas multikolinearitas.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik yang bebas dari autokorelasi.

Tabel 4.3**Hasil uji Autokorelasi**

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.632 ^a	.399	.381	45577.089	1.535

a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Menurut Singgih Santoso, panduan mengenai angka D-W (Durbin-Watson) untuk mendeteksi autokorelasi bisa dilihat pada tabel D-W. Secara umum dapat diambil patokan:

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

Pada bagian model summary, terlihat angka D-W sebesar +1,535. Hal ini model regresi diatas tidak terdapat masalah autokorelasi atau bebas autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji hetroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk menguji adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan uji glejser.

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	38968.640	19074.561		2.043	.044
PE	458212.339	317580.184	-.147	-1.443	.152
PAD	.014	.060	.026	.238	.812
DAU	.034	.020	.178	1.688	.094

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan output SPSS diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi $>0,05$. Dimana sig PE bernilai 0,152, sig PAD bernilai 0,812, sig DAU bernilai 0,094. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai dan memenuhi asumsi homoskedastisitas atau bebas heteroskedastisitas.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan analisis *kolmogorov-smirnov* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.49149167E4
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.058
	Negative	-.040
Kolmogorov-Smirnov Z		.593
Asymp. Sig. (2-tailed)		.874

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel 4.5 uji normalitas diatas dapat dilihat nilai Kolmogorov-smirnov adalah 0,593 dan nilai signifikansi sebesar 0,874. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal karena $\text{sig} > 0,05$, sehingga model regresi layak dipakai dan dapat dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya dan telah memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian Regresi Linier Berganda

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	61375.617	32608.574		1.882	.063
	PE	-681675.019	542913.498	-.102	-1.256	.212
	PAD	.666	.103	.563	6.448	.000
	DAU	.069	.034	.171	2.034	.045

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data sekunder yang diolah,2015

Dari hasil output SPSS diatas, analisis regresi berganda menghasilkan persamaan :

$$\text{Belanja modal} = 61.375,617 - 681.675,019 \text{ PE} + 0,666 \text{ PAD} + 0,69 \text{ DAU}$$

Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai konstanta (α) sebesar 61.375,617 menyatakan bahwa saat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum tetap maka Belanja Modalnya Rp 61.375,617.
- Nilai koefisien regresi -681.675,019 menyatakan bahwa setiap penurunan Pertumbuhan Ekonomi sebesar satu satuan maka akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp 681.675,019.
- Nilai koefisien regresi 0,666 menyatakan bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan Belanja Modal Pemerintah sebesar 66,6%.
- Nilai koefisien regresi 0,69 menyatakan bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar satu satuan akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 69%.

Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Dalam penelitian ini apakah variabel Pertumbuhan Ekonomi,

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Jika model regresi cukup baik maka pengujian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Tabel 4.7

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.395E11	3	4.649E10	22.382	.000 ^a
	Residual	2.098E11	101	2.077E9		
	Total	3.493E11	104			

a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan uji ANOVA, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 22,382 dengan signifikan sebesar 0,000 yaitu <0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal.

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Hasil pengujian tersebut dapat menentukan apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima.

Tabel 4.8

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	61375.617	32608.574		1.882	.063
PE	-681675.019	542913.498	-.102	-1.256	.212
PAD	.666	.103	.563	6.448	.000
DAU	.069	.034	.171	2.034	.045

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahuai bahwa hasil estimasi nilai t sebagai berikut:

- a. Variabel Pertumbuhan Ekonomi signifikan sebesar 0,212 dan lebih besar dari 0,05 sehingga Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal dan H₁ ditolak.

- b. Variabel Pendapatan Asli Daerah signifikan sebesar 0,00 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal dan H₂ diterima.
- c. Variabel Dana Alokasi Umum signifikansi sebesar 0,045 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal dan H₃ diterima.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (Adjusted R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah dari nol sampai satu. Nilai Adjusted R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.632 ^a	.399	.381	45577.089	1.535

a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Data sekunder yang diolah,2015

Hasil tabel 4.8 output SPSS dalam penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya nilai Adjusted R² adalah 0,381. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum menerangkan variabel independen yaitu Belanja Modal sebesar 38,1% sedangkan sisanya sebesar 61,9% diterangkan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini

Pembahasan

Penelitian ini merupakan studi yang meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal.

Hipotesis pertama yaitu pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Atau pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional yang akhirnya berpengaruh terhadap belanja modal. Tetapi dalam hal ini, faktanya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terlalu diperhitungkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal. Selain itu adanya faktor yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan anggaran setiap kabupaten/kota yang juga mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah. Dapat dilihat juga dari data pertumbuhan ekonomi tahun 2009-2011, dari data tersebut didapatkan hasil bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun adalah 4% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran

belanja modal karena rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun tersebut berada dibawah 5%. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya oleh Pungky Ardhani (2011) dan Deva yoga Permana (2013) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal.

Hipotesis kedua yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Disini belanja modal sebagai agensi dan pendapatan asli daerah sebagai prinsipal. Dimana pendapatan asli daerah sifatnya menambah belanja modal yang akhirnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti belanja daerah yang sifatnya menambah aset tetap. Sehingga logika teori agensi diterima dan hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap anggaran belanja modal. Dapat dilihat juga pada tabel rata-rata PAD dan BM pada tahun 2010, rata-rata PAD sebesar 74,927,000 dan rata-rata BM sebesar 74,490,000. Sedangkan rata-rata PAD dan BM tahun 2011 adalah 94,184,000 dan 146,461,000. Dimana rata-rata PAD dan BM mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya oleh Pungky Ardhani (2011) dan Deva Yoga Permana (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Dan penelitian ini bertentangan dengan Nugroho Suratno Putro (2010) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

Hipotesis ketiga yaitu dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam teori agensi, dana alokasi umum bertindak sebagai prinsipal, dana belanja modal bertindak sebagai agen. Dalam hal ini, dana alokasi umum yang ditransfer dari pemerintah pusat dapat membantu keuangan pemerintah daerah yang akhirnya digunakan sebagai belanja modal. Yang akhirnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk belanja daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum yang bersumber dari dana transfer dari pemerintah ke daerah yang bertujuan sebagai pemerataan keuangan antar daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap anggaran belanja modal. Dapat dilihat juga pada tabel rata-rata DAU dan BM pada tahun 2010, rata-rata DAU sebesar 523,001,000 dan rata-rata BM sebesar 74,490,000. Sedangkan rata-rata DAU dan BM tahun 2011 adalah 581,042,000 dan 146,461,000. Dimana rata-rata DAU dan BM mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya oleh Nugroho Suratno Putro (2010) dan Priya Adiwiyana (2011) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung dengan situasi dan kondisi disetiap daerah
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal, hal ini disebabkan oleh semakin besar pendapatan asli daerah di setiap daerah, maka dapat meningkatkan anggaran belanja modal yang digunakan sebagai modal dasar

- pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah, dan untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.
3. Variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal, hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian diatas, maka dapat dibuat saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan periode pengamatan lebih dari tiga tahun, data yang lebih lengkap, dengan data APBD dan PDRB terbaru.
2. Variabel yang digunakan untuk penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen. Diharapkan penelitian selanjutnya akan lebih baik dibandingkan penelitian ini.
3. Model penelitian diharapkan akan lebih dibandingkan model penelitian ini, dan disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih luas agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik* : Erlangga

Nordiawan, Dedi. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* : Salemba Empat

Halim, Abdul dkk. 2009. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah sebuah Peluang Penelitian anggaran dan akuntansi* : Jurnal Ilmiah Akuntansi

Halim, Abdul dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* . Bandung : Salemba Empat

Sukirno, Sadono. 2008. *Makro Ekonomi* : PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-Undang RI No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang RI No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Maemunah, Mutiara. 2006. *Fly papper pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra* : Simposium Nasional akuntansi

Ghozali, imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* . Semarang : Universitas Diponegoro

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=908> (diakses 13 oktober 2014)

<http://9kbps.wordpress.com/2012/05/09/definisi-belanja-modal/> (diakses 14 oktober 2014)

<http://portalpbj.blogspot.com/2013/06/pengertian-belanja-modal-dan-jenisnya.html>

(diakses 14 oktober 2014)

<http://anitadiahmawarni.blogspot.com/2013/10/konsep-penganggaran-sektor-publik.html>

(diakses 14 oktober 2014)

Putro, Nugroho Suatno. 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan dana Alokasi umum terhadap Anggaran Belanja Modal* : Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

<http://ekonomister.blogspot.com/2010/10/penganggaran-sektor-publik.html>

(diakses 28 oktober 2014)

https://www.google.com/search?ix=seb&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=google&gws_rd=ssl#q=uu+no+33+tahun+2004&ix=seb (diakses 28 oktober 2014)

Permana, dkk. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal* , Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 2 (4) : 1-10.

<http://i-makalah.blogspot.com/2013/02/makalah-akuntansi-agency-theory.html>

(diakses 10 november 2014)

http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/02/04/p/e/perpres_no.02-2014.pdf

(diakses 10 november 2014)

https://www.academia.edu/6194394/MAKALAH_PERTUMBUHAN_EKONOMI

(diakses 24 november 2014)

Adiwiyana, Priya. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian anggaran Belanja Modal* : Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal* : Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

Indraningrum, Try. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung* : Jurnal Ekonomi dan Bisnis.